

**TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PERPAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-
UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama: Yolanda

Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pada hakikatnya pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi pendapatan negara. Pajak mempunyai peranan penting bagi suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang sebagian besar pembiayaan, pendanaan dan pembangunan nasionalnya ditopang oleh sektor pajak. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat korelasi antara tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana perpajakan yang berimplikasi dengan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Terdapat beberapa karakteristik tindak pidana perpajakan yang berimplikasi dengan tindak pidana korupsi, salah satu karakteristik tersebut adalah adanya tindak pidana suap. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindak pidana suap oleh EK dan TM terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dilakukan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan EK dan TM berupa memberikan uang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan dengan tujuan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan tersebut melakukan upaya penghentian penyidikan suatu tindak pidana perpajakan. Dengan demikian terhadap tindakan EK dan TM dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perpajakan, Penyuapan

**CRIMINAL ACT OF BRIBERY TO CIVIL SERVANT INVESTIGATOR FOR
TAXATION IN ACCORDANCE TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 20 YEAR 2001 CONCERNING AMANDEMENT OF
LAW NUMBER 31 YEAR 1999 CONCERNING ERADICATION OF THE
CRIME OF CORRUPTION**

Name: Yolanda

Dicipline/Study Programme: Law

Contributor:

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

In its essence tax is one of the largest source of federal government revenue. Tax has an important role for a country especially for a developing country such as Indonesia which most of its financing, funding, and national development rely on tax sector. Nowadays, it cannot be denied that there are correlation between tax crimes and criminal act of corruption. Tax crimes that have implications for criminal acts of corruption can be categorized as criminal act of corruption in the field of taxation. There are several characteristics of tax crimes which has implications to criminal act of corruption, such as criminal act of bribery. This study aims to analyze whether criminal act of bribery committed by EK and TM to a Civil Servant Investigator for taxation can be held accountable for criminal liability and can be sentenced in accordance to the eradication of the crime of corruption act. EK and TM bribed the Civil Servant Investigator to stop the investigation on their alleged-tax crime. In conclusion, EK and TM can be subjected to criminal liability according to article 5 paragraph (1) A of the corruption eradication act.

Keyword: criminal act of corruption, taxation, bribery